

Kondisi aktual pelaksanaan perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang

Rangga Asmara

Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman 39 Kota Magelang Jawa Tengah 56116

E-mail: asmara@untidar.ac.id

Received: June 2016; Accepted: February 2017; Published: December 2017

Abstract

The Social Inclusion-Based Library Transformation Program organized by Bappenas and the National Library of the Republic of Indonesia that was launched in 2019 has transformed 14 village libraries in Magelang Regency into social inclusion libraries. In its development, these 14 village libraries were then classified into two types, (1) optimally developed libraries and (2) under-developed libraries that do not meet the expected ideal conditions. This study aimed to describe the actual conditions of the implementation of social inclusion-based village libraries in Magelang Regency. This study used a mixed-method approach with a descriptive method. This research was conducted in 8 (eight) village libraries that have implemented social inclusion principles in Magelang Regency. In collecting the data, the study involved the human instrument (researcher himself) (Sugiyono, 2014:306) and other supporting instruments such as (1) observation guidelines, (2) interview guidelines, (3) digital recording devices, (4) camera, and (5) field notes. Data collection in this study used four methods included observation, interviews, FGD, and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out using a mixed-method. The findings suggested that although the actual condition of the implementation of social inclusion-based village libraries in Magelang Regency met the 8 (eight) aspects (e.g. (1) library material management, (2) collections, (3) services, (4) library staff, (5) library administration, (6) library management, (7) cooperation or partnership, and (8) community empowerment), the managerial teams of these social inclusion village libraries in Magelang Regency need to improve the service and library management aspects.

Keywords: actual condition; village library; social inclusion; Magelang Regency

Abstrak

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Bappenas dan Perpustakaan Nasional yang digulirkan pada tahun 2019 telah mentransformasi 14 perpustakaan desa di Kabupaten Magelang menjadi perpustakaan inklusi sosial. Dalam perkembangannya, 14 perpustakaan desa tersebut kemudian diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu yang dapat berkembang secara optimal dan yang belum berkembang sesuai kondisi ideal yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi aktual pelaksanaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 8 (delapan) perpustakaan desa yang telah menerapkan inklusi sosial di Kabupaten Magelang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) saat mengumpulkan data (Sugiyono, 2014:306), dan didukung dengan instrumen lain, yaitu: (1) pedoman observasi, (2) pedoman wawancara, (3) alat perekam digital, (4) kamera, dan (5) catatan lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat metode, yaitu observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara *mix method*. Berdasarkan penelitian, kondisi aktual pelaksanaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang dapat dikatakan sudah memenuhi 8 (delapan) aspek, yaitu (1) pengelolaan bahan perpustakaan, (2) koleksi, (3) layanan, (4) tenaga perpustakaan, (5) penyelenggaraan perpustakaan, (6) pengelolaan perpustakaan, (7) kerja sama atau kemitraan, dan (8) pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, pengelola perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang perlu meningkatkan pada aspek layanan dan pengelolaan perpustakaan.

Kata Kunci: kondisi aktual; perpustakaan desa; inklusi sosial; Kabupaten Magelang

PENDAHULUAN

Selama ini perpustakaan umum yang dikenal masyarakat adalah perpustakaan yang berlokasi di ibukota kabupaten. Padahal perpustakaan umum mencakup juga perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa. Perpustakaan umum yang berlokasi selain di kota sering kali tidak dikenali, sehingga kurang dimanfaatkan warga di pedesaan (Ariyani & Pageh, 2018:254).

Menurut Silalahi (2021) perkembangan perpustakaan di Indonesia jika dilihat dengan kondisi perpustakaan dan masyarakat, masih jarang ditemukan perpustakaan khususnya di desa dan kelurahan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat (*community center*) kecuali hanya peminjaman buku, baca buku di tempat bahkan buku hanya sebagai pajangan tanpa sentuhan berarti bagi pengguna. Hal ini disebabkan berbagai alasan seperti: bukunya belum sesuai dengan potensi lokal yang akan dikembangkan (*life skills*), belum adanya pengelola perpustakaan yang mampu menjelaskan kepada pengguna tentang buku-buku perpustakaan, kurangnya sarana/prasarana dan dukungan dana serta yang paling parahnya memang rendahnya minat baca masyarakat.

Perpustakaan desa merupakan perpanjangan tangan layanan dari perpustakaan daerah (*public library*). Tumbuh dan kembangnya perpustakaan desa merupakan tanggung jawab perpustakaan daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 pada pasal 2 mengamanatkan bahwa

“Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan”. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan bagi masyarakat yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi semua kalangan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerja bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut di pasal 5 dijelaskan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial juga berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Dengan demikian, perpustakaan merupakan aset strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Jangkauannya yang luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum, sehingga semua anggota masyarakat tanpa kecuali bisa memanfaatkan perpustakaan untuk pengembangan dirinya.

Sayangnya, akses warga terhadap perpustakaan di pedesaan masih sangat minim. Hanya sebagian kecil desa yang mengembangkan dan memiliki perpustakaan. Meski demikian, sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, beberapa desa dan kelurahan sudah mulai merancang untuk membangun sebuah perpustakaan. Berdasarkan data tahun 2018, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mendata jumlah perpustakaan di Indonesia sebanyak 164.610 unit perpustakaan. Lebih lanjut, menurut data yang dihimpun Media Indonesia (2018) sebaran perpustakaan di wilayah Indonesia ialah 23,45% berada di Sumatra, 47,79% di Jawa, 11,52% di Sulawesi, 8,47% di Nusa Tenggara, 6,67% di Kalimantan, dan 0,4% di Papua. Dari total perpustakaan sebanyak 164.610 unit, terdapat perpustakaan umum 42.460 unit, perguruan tinggi 6.552 unit, khusus 2.057 unit, dan sekolah 113.541 unit.

Menurut catatan BPS Kabupaten Magelang (2021:141) jumlah perpustakaan di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan. Data jumlah perpustakaan di Kabupaten Magelang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 1.

Jumlah Perpustakaan	2016	2017	2018	2019	2020
	791	793	797	841	854

Dari data yang dihimpun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang tahun 2020 jumlah perpustakaan desa di Kabupaten Magelang sebanyak 166 perpustakaan. Jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Magelang, berjumlah 372 desa (BPS Kabupaten Magelang, 2021:28). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua desa berkesempatan untuk memiliki sumber belajar berupa perpustakaan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara serius melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Perpusnas telah menetapkan program perpustakaan

berbasis inklusi sosial sebagai salah satu program prioritas nasional percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasari oleh perpustakaan yang dianggap mampu menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses informasi dari buku dan internet yang dimiliki oleh perpustakaan, tersedianya ruang belajar dan berkegiatan masyarakat, serta adanya pendampingan yang diberikan oleh pustakawan, sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera.

Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan (BPS Kabupaten Magelang, 2021:9). Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan potensinya masing-masing. Misalnya di Kecamatan Srumbung memiliki potensi lokal salak, Kecamatan Sawangan dengan potensi lokal perikanan, Kecamatan Borobudur dengan potensi lokal pariwisata, dan lain-lain.

Adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi serta kekayaan yang dimiliki. Penyerahan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Bappenas dan Perpusnas yang digulirkan pada tahun 2019 telah mentransformasi 14 perpustakaan desa di Kabupaten Magelang menjadi perpustakaan inklusi

sosial. Dalam perkembangannya, berdasarkan asesmen dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang tahun 2021, 14 perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tersebut kemudian diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu yang dapat berkembang secara optimal dan yang belum berkembang sesuai kondisi ideal yang diharapkan. Data 14 perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang

No	Nama Perpustakaan	Alamat
1	Muda Bhakti	Desa Ngablak Kecamatan Srumbung
2	Rumah Pintar	Desa Sedayu Kecamatan Muntilan
3	Mardining Sigit	Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan
4	Pondok Sejuta Ilmu	Desa Ngablak Kecamatan Ngablak
5	Wahana Wiyata	Desa Majaksingi Kecamatan Borobudur
6	Bahrul Ulum	Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo
7	Cerdas	Desa Bajarnegoro Kecamatan Mertoyudan
8	Melati	Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
9	Condroudomo	Desa Madyocondro Kecamatan Secang
10	Sukses	Desa Sutopati Kecamatan Kajoran
11	Ngudi Ngelmu	Desa Wulunggunung Kecamatan Sawangan
12	Sahwahita	Desa Butuh Kecamatan Sawangan
13	Rumah Baca	Desa Salam Kecamatan Salam
14	Cahaya Ilmu	Desa Selomirah Kecamatan Ngablak

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang

Keterangan:

 : berkembang secara optimal

 : belum berkembang sesuai kondisi ideal yang diharapkan

Inklusi sosial dipandang sebagai suatu pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam sistem kemasyarakatan (Utami & Prasetyo, 2019:33-34). Dari konsep tersebut perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dimaknai sebagai bentuk transformasi layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Misno (2020) menyatakan transformasi tersebut dapat diwujudkan dalam empat peran, yaitu: (1) perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan, (2) perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat, (3) perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat, dan (4) perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Lebih lanjut Malawa (2019:4) menjelaskan tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial antara lain: (1) meningkatkan literasi informasi berbasis TIK, (2) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta (3) memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, namun menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Utami & Prasetyo (2019:33) perubahan paradigma perpustakaan berbasis inklusi sosial

adalah mentransformasikan fungsi-fungsi perpustakaan menjadi sebagai berikut.

Koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan tidak lagi menjadi koleksi yang usang dan jarang dalam pemanfaatannya oleh masyarakat karena dalam proses pengadaan bahan pustaka tidak memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat yang dilayaninya, namun beralih menjadi wahana rujukan informasi untuk pencarian solusi permasalahan karena proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang mementingkan kebutuhan informasi pengguna dalam rumus pengadaanya.

Perpustakaan bukan hanya sekadar tempat menyimpan buku-buku dalam rak-rak panjang karena perpustakaan hadir sebagai fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan.

Perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang sunyi karena jarang ada masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan, namun keberadaan perpustakaan sendiri menjadi tempat masyarakat mengembangkan potensi diri (*makerspace*).

Perpustakaan berubah dari yang awalnya sebuah lembaga yang minim sentuhan teknologi informasi menjadi perpustakaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat yang berkedudukan jauh dari lokasi perpustakaan. Untuk bisa mengakses sumber daya informasi yang ada di perpustakaan sudah bukan menjadi barang yang sulit, karena perpustakaan bisa melayani masyarakat yang berlokasi jauh dari lokasi perpustakaan dengan menggunakan internet sebagai media hubungannya.

Mengubah paradigma pustakawan yang pasif menjadi pustakawan yang aktif

berperan sebagai agen informasi. Pustakawan dituntut untuk selalu bisa menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkannya (konsep pustakawan bergerak). Pustakawan menjadi sosok sentral yang menjadi penentu berhasil ataupun tidaknya program ini. Ledakan informasi yang pesat menuntut pustakawan untuk berkolaborasi atau bekerja tidak hanya dengan sesama pustakawan saja, melainkan menuntut pustakawan untuk bekerja sama dengan bidang profesi lain dalam mengelola informasi.

Penelitian Utami & Prasetyo (2019) berjudul "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Pembangunan Sosial-Ekonomi Masyarakat" juga mendeskripsikan secara terperinci beberapa transformasi yang harus dilakukan perpustakaan antara lain: (1) dengan mengembangkan koleksi bahan pustaka dengan berorientasi pada subjek-subjek yang bisa menunjang kebutuhan informasi masyarakat pengguna perpustakaan guna peningkatan ekonominya; dan (2) pendayagunaan kemajuan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan guna menjangkau lebih jauh lagi. Perpustakaan dapat mengembangkan perpustakaan digital guna melayani masyarakat pengguna perpustakaan tanpa batasan-batasan yang dimiliki oleh perpustakaan konvensional yaitu batasan gedung perpustakaan yang statis dan keterbatasan jam layanan perpustakaan.

Dalam penelitian Haryanti (2019) yang berjudul "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial", penyelenggara perpustakaan harus melakukan transformasi fungsi, fasilitas, pustakawan, dan pemustaka. Transformasi Fungsi berarti perpustakaan berfungsi *getting the*

right information to the right people in the right format at the right time so as to influence decision-making. Transformasi fasilitas berarti perpustakaan tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi pustakawan berarti pustakawan merupakan agen perubahan dan menjadi poros informasi. Transformasi pemustaka berkaitan dengan *digital native* dan *digital immigrant*.

Lebih lanjut, Albaar dan Saufa (2019) yang meneliti tentang "Peran *Makerspace* di Perpustakaan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta" menawarkan sebuah model implementasi *makerspace* berbasis kewirausahaan yang dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Kegiatan *makerspace* mampu memberikan kontribusi berupa lingkungan yang kreatif dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para anggota. Namun, kegiatan ini masih belum memberikan kontribusi *prototyping* dikarenakan perpustakaan belum menyediakan referensi dan informasi memadai tentang desain dan motif batik yang banyak diminati pasar.

Dengan demikian, perpustakaan memegang peranan penting untuk berperan dalam membantu masyarakat mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki melalui ketersediaan akses layanan informasi, sebagai pusat belajar, dan berkegiatan masyarakat (Rachman, Sugiana, & Rohanda, 2019:907). Penyediaan buku-buku yang sesuai dengan potensi lokal dan lapangan pekerjaan masyarakat akan merangsang pembelajaran sepanjang hayat.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat ditarik sintesis bahwa beberapa

peneliti sebelumnya belum menaruh perhatian yang memadai dan signifikan pada kajian kondisi aktual pelaksanaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini melibatkan sejumlah informan yang merepresentasikan pelaksana, pengguna, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini dilakukan di 8 (delapan) perpustakaan desa yang telah menerapkan inklusi sosial dengan spesifikasi, yakni 4 (empat) perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dapat berkembang secara optimal dan 4 (empat) perpustakaan desa yang belum berkembang sesuai kondisi ideal yang diharapkan. Daftar lokasi penelitian disajikan pada tabel 3.

Tabel 3

Lokasi Penelitian

No	Nama Perpustakaan	Alamat
Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dapat berkembang secara optimal		
1	Muda Bhakti	Desa Ngablak Kecamatan Srumbung
2	Rumah Pintar	Desa Sedayu Kecamatan Muntilan
3	Mardining Sigit	Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan
4	Pondok Sejuta Ilmu	Desa Ngablak Kecamatan

Ngablak			sesuai kondisi ideal yang diharapkan	Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2019 & 2020
Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang belum berkembang sesuai kondisi ideal yang diharapkan				
1	Wahana Wiyata	Desa Majaksingi Kecamatan Borobudur		
2	Bahrul Ulum	Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo		b. Program berjalan belum optimal
3	Sukses	Desa Sutopati Kecamatan Kajoran		c. Sarpras bantuan belum digunakan penuh
4	Sahwahita	Desa Butuh Kecamatan Sawangan		d. Dokumentasi mulai berkembang

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 perpustakaan desa. Pemilihan 8 (delapan) lokasi penelitian tersebut sebagai sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel pada 8 (delapan) lokasi tersebut berdasarkan beberapa kriteria sebagaimana disajikan pada tabel 4.

Tabel 4

Kriteria Penentuan Sampel

No	Kualifikasi Perpudes	Kriteria
1	Berkembang secara optimal	a. Penerima manfaat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2019 b. Perpudes berprestasi c. Program berjalan optimal, berdampak, dan telah dirasakan masyarakat
2	Belum berkembang	a. Penerima manfaat

Beberapa kriteria tersebut telah diversifikasi berdasarkan hasil pengkajian data primer wawancara kepada Arifah Fitratin, A.Md. dan Wahyu Puji Pamungkas, S.IP. selaku pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang pada tanggal 19 April 2021 secara daring. Adapun penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama tiga bulan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2021.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) saat mengumpulkan data (Sugiyono, 2014:306), dan didukung dengan instrumen lain, yaitu: (1) pedoman observasi, (2) pedoman wawancara, (3) alat perekam digital, (4) kamera, dan (5) catatan lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi berdasarkan jenisnya, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan *focus group discussion* (FGD), sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

empat metode, yaitu observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi.

Berdasarkan tujuan penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis *mix method*. Analisis *mix method* berfokus pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dipadukan. Analisis data kuantitatif berfokus pada uji independent sample t-test dengan bantuan aplikasi SPSS, sedangkan analisis data kualitatif merujuk pada model analisis kualitatif Miles, Huberman, & Saldana (2014:35) yang berfokus pada analisis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data (kategorisasi data), penyajian data, dan menarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kondisi aktual pelaksanaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang dapat dikatakan sudah memenuhi 8 (delapan) aspek dalam: (1) Panduan Umum Literasi untuk Kesejahteraan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (2019), (2) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan (3) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Desa/Kelurahan, yaitu (1) pengelolaan bahan perpustakaan, (2) koleksi, (3) layanan, (4) tanaga perpustakaan, (5) penyelenggaraan perpustakaan, (6) pengelolaan perpustakaan, (7) kerja sama atau

kemitraan, dan (8) pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Bahan Perpustakaan

Dari aspek pengelolaan bahan perpustakaan, perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi. Namun demikian, dalam inventarisasi, klasifikasi, pengatalogan dan *labelling*, masih dilakukan secara manual, belum semua perpustakaan inklusi sosial menggunakan sistem otomatisasi seperti *Senayan Library Management System (SLiMS)*. Berdasarkan observasi, penggunaan SLiMS ditemukan di dua perpustakaan inklusi sosial yang berkembang optimal, yaitu Perpustakaan Mangunsari dan Sedayu.

Standar pengolahan bahan perpustakaan (deskripsi bibliografi, klasifikasi, dan tajuk subjek) sudah mengikuti ketentuan baku nasional secara konsisten. Bahkan, berdasarkan observasi di Perpustakaan Mangunsari dan Ngablak Kecamatan Sumbing telah menggunakan aplikasi *Elektronik-Dewey Decimal Classification (e-DDC)*. Aplikasi e-DDC adalah suatu aplikasi perangkat lunak untuk membantu memudahkan pustakawan dalam menentukan nomor klasifikasi koleksi perpustakaan berdasarkan sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey, atau biasa disebut

Klasifikasi DDC. Tampilan aplikasi e-DDC diilustrasikan pada gambar 13.



Gambar 1 Tampilan Aplikasi e-DDC

Berdasarkan aspek kelengkapan buku, sejauh ini kelengkapan buku terdiri atas kartu buku, kantong kartu buku, slip tanggal kembali, label buku, dan stemple. Belum semua perpustakaan inklusi sosial di Kabupaten Magelang menggunakan barcode/chip/RFID (sebagai perangkat otomasi). Berdasarkan observasi penggunaan mesin barcode ditemukan di Perpustakaan Ngablak Kecamatan Srumbung. Namun, barcode belum diterapkan di semua koleksi.

Koleksi

Berdasarkan hasil observasi dan uji statistik, koleksi yang tersedia di perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel 5 s.d. 7.

Tabel 5
Jumlah Koleksi Perpustakaan Desa Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang

No	Perpustakaan Desa	Jumlah Koleksi	Kemutakhiran Koleksi	Koleksi Nonbuku
Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dapat berkembang secara optimal				
1	Muda Bhakti	4.287	Mutakhir	Alat peraga, APE
2	Rumah Pintar	2.220 (termasuk	Mutakhir	APE, CD

		majalah braille)		cerita, buku braille
3	Mardining Sigit	2.892	Mutakhir	Globe, peta, APE
4	Pondok Sejuta Ilmu	2.500	Mutakhir	Peta, globe, APE, poster

Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang belum berkembang sesuai kondisi ideal yang diharapkan

1	Wahana Wiyata	3.750	Mutakhir	APE, globe, CD cerita
2	Bahrul Ulum	1.300	Mutakhir	
3	Sukses	1.700	Belum Mutakhir	APE
4	Sahwahita	2.219	Mutakhir	Koleksi nonbuku: APE

Tabel 6
Rata-Rata Jumlah Koleksi Pustaka Perpustakaan

	perpus	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
jumlahkoleksi	1.00	4	2949.750	869.6614	434.8307
	2.00	4	2242.250	1073.269	536.6346

Berdasarkan tabel 6 diketahui rata-rata jumlah koleksi pustaka kelompok perpustakaan inklusi sosial yang berkembang optimal adalah sebanyak 2.950 eksemplar, sedangkan kelompok perpustakaan inklusi sosial yang belum berkembang adalah sebanyak 2242 eksemplar. Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan jumlah koleksi pustaka pada kedua kelompok statistik.

Tabel 7
Independent Samples Test Jumlah Koleksi Pustaka Perpustakaan

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
jumlahkoleksi	Equal variances assumed	.114	.747	1.024	6	.345	707.5000	690.6913	-982.561	2397.561
	Equal variances not assumed			1.024	5.753	.347	707.5000	690.6913	-1000.32	2415.325

Berdasarkan tabel 7 hasil *independent samples test* pada bagian *equal variances assumed* diketahui nilai Sig (2-tailed) sebesar $0,345 > 0,05$, maka sebagaimana hipotesis dalam uji *independent sample t-test* dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif statistik tidak ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara jumlah koleksi pustaka perpustakaan inklusi sosial yang berkembang optimal dan perpustakaan inklusi sosial yang belum berkembang. Namun, secara deskriptif kualitatif meski koleksi yang tersedia di perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang memenuhi dari aspek jumlah koleksi, tetapi dari aspek kemutakhiran dan variasi koleksi masih belum sesuai standar sebagaimana diatur dalam SNP (2017). Hal inilah yang membedakan perpustakaan desa inklusi sosial yang berkembang optimal dan belum berkembang. Perpustakaan desa inklusi sosial yang berkembang optimal pada umumnya memenuhi dari aspek jumlah, kemutakhiran, dan variasi koleksi. Namun, tidak demikian perpustakaan desa inklusi sosial yang belum berkembang, pada umumnya memang mampu memenuhi dari aspek jumlah dan kemutakhiran koleksi, tetapi tidak pada aspek variasi koleksi.

Jika merujuk Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (SNP), yang diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, perpustakaan desa setidaknya memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul, koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi, koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi (minimal

ensiklopedia dan kamus), surat kabar dan majalah. Koleksi perpustakaan terdiri atas berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat dan koleksi referensi paling sedikit terdiri atas ensiklopedia dan kamus.

Berdasarkan observasi, perpustakaan desa inklusi sosial yang belum berkembang belum mampu memenuhi jumlah koleksi referensi anak dan remaja/dewasa seperti kamus, ensiklopedia, atlas, peta/*globe*, direktori, *handbook*, manual, biografi, statistik, dan pedoman. Selain itu, perpustakaan pada umumnya tidak melanggan surat kabar dan majalah secara mandiri, karena kantor balai desa telah melanggan koran atau majalah tersebut. Koleksi nonbuku seperti CD film atau cerita hanya ditemukan di Perpustakaan Rumah Pintar dan Wahana Wiyata.

Layanan

Berdasarkan hasil observasi dan uji statistik, pelayanan perpustakaan yang menyangkut jam buka, jenis pelayanan, dan pola pelayanan disajikan pada tabel 8 s.d. 10.

Tabel 8

Jam Buka, Jenis Layanan, dan Pola Layanan Perpustakaan Desa Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang

No	Perpustakaan Desa	Jenis Layanan	Jam Buka
Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dapat berkembang secara optimal			
1	Muda Bhakti	6 layanan: baca tempat sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, pembelajaran masyarakat, perpustakaan	Setiap hari, pukul 08.00–17.00 (9 jam)

		keliling//pojok baca		sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, pembelajaran masyarakat	(4 jam)		
2	Rumah Pintar	5 layanan: baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, pembelajaran masyarakat	Setiap hari, pukul 12.00 – 15.00 (3 jam)	3	Sukses	6 layanan: baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, pembelajaran masyarakat	Setiap hari, pukul 14.00 – 16.00 (2 jam)
3	Mardining Sigit	6 layanan: baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, pembelajaran masyarakat, perpustakaan keliling//pojok baca	Setiap hari, pukul 13.00 – 17.00 (4 jam)	4	Sahwahita	6 layanan: baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, pembelajaran masyarakat, perpustakaan keliling//pojok baca	Setiap hari, pukul 08.00 – 15.30 (7,5 jam)
4	Pondok Sejuta Ilmu	6 layanan: baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, pembelajaran masyarakat, perpustakaan keliling//pojok baca	Senin – Kamis, pukul 08.00 – 12.00 (4 jam)				

Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang belum berkembang sesuai kondisi ideal yang diharapkan

1	Wahana Wiyata	5 layanan: baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, pembelajaran masyarakat	Senin – Jumat, 08.00 – 10.00 (2 jam)
2	Bahrul Ulum	5 layanan: baca di tempat,	Setiap hari, pukul 09.00 – 13.00

Tabel 9
Rata-Rata Jam Buka Perpustakaan

	perpus	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
jambuka	1.00	4	5.0000	2.70801	1.35401
	2.00	4	5.0000	2.48328	1.24164

Berdasarkan tabel 9 diketahui rata-rata jam buka untuk perpustakaan inklusi sosial yang berkembang optimal adalah sebanyak 5 jam/hari, sedangkan perpustakaan inklusi sosial yang belum berkembang adalah sebanyak 5 jam/hari. Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan jumlah tenaga perpustakaan desa pada kedua kelompok statistik.

Tabel 10
Independent Samples Test Jam Buka Perpudes

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
jambuka	Equal variances assumed	.000	1.000	.000	6	1.000	.00000	1.83712	-4.49526	4.49526
	Equal variances not assumed			.000	5.956	1.000	.00000	1.83712	-4.50341	4.50341

Berdasarkan tabel 10 hasil *independent samples test* pada bagian *equal variances assumed* diketahui nilai Sig (2-tailed) sebesar $1 > 0,05$, maka sebagaimana hipotesis dalam uji *independent sample t-test* dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif statistik tidak ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara jam buka perpudes inklusi sosial yang berkembang optimal dan perpudes inklusi sosial yang belum berkembang. Namun, secara deskriptif kualitatif pada aspek jam buka masih belum memenuhi standar sebagaimana diatur dalam SNP, yaitu paling sedikit 6 (enam) jam per hari atau 42 jam per minggu.

Pada aspek jenis pelayanan dan pola pelayanan, berdasarkan observasi perpustakaan desa telah memiliki 6 (enam) layanan, yaitu baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, perpustakaan keliling/pojok baca, dan pembelajaran masyarakat. Meski demikian belum semua perpustakaan desa memberikan layanan penelusuran informasi secara optimal. Hal ini yang membedakan perpustakaan inklusi sosial yang berkembang optimal dan yang belum berkembang. Perpustakaan desa inklusi sosial yang belum berkembang pada umumnya belum melanggan paket internet secara mandiri, melainkan masih bergantung pada jaringan internet kantor balai desa. Perpustakaan memang telah menyediakan perangkat komputer yang tersambung dengan akses internet, namun sering kali ada masalah jaringan yang

sumbernya berasal dari kantor desa. Dengan demikian, pemustaka tidak bisa mengakses layanan ini karena internet bermasalah.

Pola pelayanan yang diberikan kepada pemustaka belum sepenuhnya dapat dikatakan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka. Pada aspek sistem peminjaman/pengembalian koleksi perpustakaan masih menggunakan cara manual dengan kartu. Pemustaka juga belum bisa mengakses koleksi perpustakaan secara daring. Perpudes inklusi sosial di Kabupaten Magelang belum menggunakan sistem otomasi pencarian informasi seperti *Online Public Acces Catalog* (OPAC).

Berdasarkan observasi, belum semua perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang mengembangkan layanan inovatif yang dapat menarik animo masyarakat berkunjung ke perpudes. Layanan inovatif hadir berdasarkan identifikasi pustakawan atas kebutuhan suatu kelompok yang kemudian diwujudkan melalui layanan tersebut. Jika merujuk Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Desa/Kelurahan, layanan inovatif yang berhubungan dengan pembelajaran masyarakat, seperti layanan anak, layanan literasi, dan layanan bercerita. Pada umumnya perpudes inklusi sosial di Kabupaten Magelang telah mengoptimalkan jenis layanan ini, sebagaimana tampak dalam program kerja perpudes.

Salah satu *best practice* layanan inovatif yang dikembangkan oleh Perpudes Sutopati adalah layanan kesehatan. Perpudes menyediakan oximeter, tensimeter, timbangan badan

untuk merespons kebutuhan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 ini. Layanan inovatif ini tidak selalu dikaitkan dengan ketersediaan buku, melainkan juga berupa layanan perpustakaan yang menyediakan layanan dan ruang bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi Covid-19, misalnya update data Covid-19 di desa, mekanisme isolasi mandiri, informasi vaksinasi, dll.

Pengembangan layanan ekstensi seperti perpustakaan keliling dan pojok baca juga sudah berjalan optimal. Perpustakaan Muda Bahkti dan Sahwahita memiliki perpustakaan keliling yang rutin berkeliling ke dusun-dusun. Bahkan, perpustakaan keliling di Perpustedes Sahwahita memodifikasi mobil pribadi kepala desa menjadi armada perpustakaan keliling. Perpustakaan Mardining Sigit mengembangkan program kotak buku bekerja sama dengan sekolah di sekitar sebagai bentuk modifikasi perpustakaan keliling. Secara teknis program kotak buku, guru datang ke perpustedes untuk mengambil kotak (kardus) yang di dalamnya telah diisi bahan pustaka.

Pojok baca yang eksis berjalan adalah pojok baca Dusun Krangean Desa Ngablak Kecamatan Ngablak dan pojok baca kerja sama Perpustedes Sukses dengan Kafe Sutopati. Bahkan, pojok baca di Dusun Krangean memiliki gendung mandiri untuk operasional.



Gambar 2 Perpustakaan Keliling Perpustedes Muda Bahkti



Gambar 3 Pojok Baca Dusun Krangean Desa Ngablak

Salah satu upaya perpustakaan mendekatkan buku kepada masyarakat dengan mengoptimalkan perpustakaan keliling dan pojok baca. Hal ini dilakukan dengan membagikan bahan bacaan yang bersifat informatif ke beberapa titik-titik keramaian, usaha, dan kerajinan.

Pada umumnya kebijakan peminjaman buku di perpustakaan desa, warga diperbolehkan meminjam maksimal 3 (tiga) buku selama seminggu dan harus dikembalikan paling lambat 2 (dua) minggu. Apabila hendak memperpanjang masa peminjaman, pemustaka tetap harus datang ke perpustakaan untuk menyampaikan perpanjangan buku.

Jika buku yang dipinjam hilang maka masyarakat mengganti dengan buku yang sejenis, tidak harus sama persis seperti buku yang dihilangkan, bisa dari penerbit yang berbeda. Misalnya buku yang dihilangkan tentang cara memandikan

jenazah, maka harus mengganti buku yang topiknya sama tentang memandikan jenazah. Kebijakan ini bertujuan agar memudahkan masyarakat untuk mengganti buku dan masyarakat tetap merasa nyaman untuk datang ke perpustakaan.

Tenaga Perpustakaan

Berdasarkan wawancara pada umumnya tidak ada kebijakan khusus dalam rekrutmen petugas perpustakaan desa. Proses pemilihan petugas perpustakaan hanya dengan menunjuk orang yang bersedia saja tanpa harus melihat kriteria dan persyaratan apapun.

Salah satu strategi yang dilakukan beberapa perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang ialah merekrut pengelola perpustakaan dari kalangan perangkat desa, agar perpustakaan desa mendapatkan perhatian dan keberpihakan dari pemerintah desa. Selain itu, ada alternatif lain yang bisa ditempuh, yaitu mencari relawan untuk mengelola perpustakaan desa misalnya dari PKK atau karang taruna.

Sumber daya manusia tentu merupakan elemen penting yang akan menggerakkan perpustakaan desa. Idealnya, profil pengelola perpustakaan desa ialah sarjana perpustakaan yang pengadaannya merupakan kewajiban pemerintah desa atau pemerintah daerah melalui seleksi calon aparatur sipil negara (CASN/CPNS). Namun demikian, belum semua pemerintah desa atau pemerintah daerah mampu mewujudkan kondisi ideal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan uji statistik, tenaga perpustakaan yang berkaitan dengan jumlah tenaga, kualifikasi kepala perpustakaan, kualifikasi staf perpustakaan, dan

pembinaan tenaga pengelolaan perpustakaan disajikan pada tabel 11 s.d. 13.

Tabel 11

Jumlah Tenaga, Kualifikasi Kepala Perpustakaan, Kualifikasi Staf Perpustakaan, dan Pembinaan Tenaga Pengelolaan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang

No	Perpustakaan Desa	Jumlah Tenaga	Kualifikasi Kepala dan Staf Perpustakaan
Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dapat berkembang secara optimal			
1	Muda Bhakti	17 orang	Kepala: sarjana dengan diklat perpustakaan Staf: sarjana
2	Rumah Pintar	3 orang	Kepala: doktor dengan diklat perpustakaan Staf: sarjana
3	Mardining Sigit	11 orang	Kepala: sarjana dengan diklat perpustakaan Staf: sarjana
4	Pondok Sejuta Ilmu	2 orang	Kepala: sarjana dengan diklat perpustakaan Staf: SMA
Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang belum berkembang sesuai kondisi ideal yang diharapkan			
1	Wahana Wiyata	3 orang	Kepala: sarjana dengan diklat perpustakaan Staf: SMA
2	Bahrul Ulum	3 orang	Kepala: sarjana dengan diklat perpustakaan Staf: Sarjana
3	Sukses	12 orang	Kepala: SMA belum diklat Staf: SMA
4	Sahwahita	9 orang	Kepala: Sarjana

belum diklat
 Staf:
 Sarjana&diploma

Tabel 12
 Rata-Rata Jumlah Tenaga Perpustedes

	perpus	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
jmltenaga	1.00	4	8.2500	7.08872	3.54436
	2.00	4	6.7500	4.50000	2.25000

Berdasarkan tabel 12 diketahui rata-rata jumlah tenaga untuk perpustedes inklusi sosial yang berkembang optimal adalah sebanyak 8 orang, sedangkan perpustedes inklusi sosial yang belum berkembang adalah sebanyak 7 orang. Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan jumlah tenaga perpustakaan desa pada kedua kelompok statistik.

Tabel 13
Independent Samples Test Jumlah Tenaga Perpustedes

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
jmltenaga	Equal variances assumed	2.087	.199	.357	6	.733	1.50000	4.19821	-8.77266	11.77266
	Equal variances not assumed			.357	5.080	.735	1.50000	4.19821	-9.24087	12.24087

Berdasarkan tabel 13 hasil *independent samples test* pada bagian *equal variances assumed* diketahui nilai Sig (2-tailed) sebesar $0,357 > 0,05$, maka sebagaimana hipotesis dalam uji *independent sample t-test* dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif statistik tidak ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara jumlah tenaga perpustedes inklusi sosial yang berkembang optimal dan perpustedes inklusi sosial yang belum berkembang. Artinya secara deskriptif kualitatif dari segi jumlah tenaga, kualifikasi kepala perpustakaan, kualifikasi staf perpustakaan, dan pembinaan tenaga pengelolaan perpustakaan sudah memenuhi persyaratan minimal SNP (2017), yaitu paling sedikit 2 orang. Dari

segi kualifikasi kepala dan staf perpustakaan sebagian besar telah memenuhi standar. Namun demikian, untuk beberapa perpustedes inklusi sosial yang berkategori belum berkembang perlu segera mendapatkan perhatian dari perpustakaan daerah sebagai perpustakaan pembina untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

Berdasarkan hasil wawancara, semua pustakawan perpustedes inklusi sosial di Kabupaten Magelang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Dari segi status kepegawaian, semua kepala perpustedes merupakan pegawai sukarela dan pegawai yang diperbantukan dari kantor desa/kelurahan. Artinya bukan pegawai tetap fungsional dari latar belakang pustakawan profesional. Untuk itu, pustakawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan diwajibkan mengikuti diklat teknis pengelolaan perpustakaan dari perpustnas atau perpustakaan daerah.

Pengembangan kompetensi pustakawan selanjutnya, yaitu dengan mengikutsertakan pustakawan dalam kegiatan *workshop*, seminar, dan bimtek. Terlebih saat masa pandemi ini banyak kegiatan seminar yang dilakukan secara daring atau biasa disebut sebagai webinar, sehingga pustakawan dapat mengikuti kegiatan seminar dengan mudah. Dalam meningkatkan kompetensi melalui seminar, pustakawan dapat mengikuti seminar-seminar secara mandiri sebagai wujud keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.

Keikutsertaan pustakawan dalam organisasi profesi atau komunitas literasi dapat menunjang kualitas sumber daya manusia dalam profesi pustakawan.

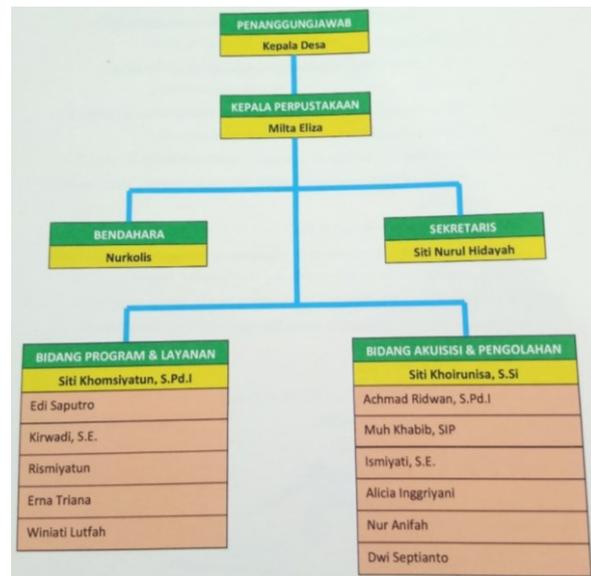
Organisasi profesi atau komunitas literasi di Kabupaten Magelang seperti Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Gerakan Guru Penggerak Literasi (Garasi), dan komunitas literasi lainnya.

Organisasi profesi dibentuk untuk mengarahkan pustakawan dalam mengelola perpustakaan dengan baik, penyedia informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan mengembangkan ilmu perpustakaan yang dimiliki oleh pustakawan. Organisasi profesi dapat menekankan pada pengembangan bidang, menambah kualitas anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mengarahkan profesionalisme anggota.

Penyelenggaraan Perpustakaan

Berdasarkan hasil observasi, penyelenggaraan perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang sudah memenuhi standar SNP (2017). Pada umumnya perpustakaan inklusi sosial dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan keputusan kepala desa. Perpustakaan juga memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan.

Setiap perpustakaan inklusi sosial di Kabupaten Magelang memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala dan beberapa staf perpustakaan yang bertugas dalam pelayanan teknis dan pemustaka. Namun demikian, berdasarkan observasi belum semua perpustakaan memiliki unit layanan teknologi informasi (TI). Selain itu, deskripsi tugas dan tanggung jawab unit-unit layanan di dalamnya juga belum terdeskripsikan dengan jelas, baik di buku profil atau papan pajang struktur organisasi. Berikut ini salah satu contoh struktur organisasi Perpustakaan Muda Bakhti Desa Ngablak Kecamatan Srumbung.



Gambar 4 Struktur Organisasi Perpustakaan Muda Bakhti

Pengelolaan Perpustakaan

Berdasarkan hasil observasi, perpustakaan inklusi sosial di Kabupaten Magelang pada umumnya memiliki dokumen perencanaan seperti rencana kerja tahunan dan bulanan. Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel, oleh pengelola dan volunteer. Pelaksanaan perpustakaan juga didasari pada prosedur yang baku atau standar operasional prosedur (SOP). Misalnya SOP pengolahan bahan pustaka (Perpustakaan Sahwahita) & SOP layanan perpustakaan (Perpustakaan Pondok Sejuta Ilmu).

PROSEDUR LAYANAN PERPUSTAKAAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Anggota	Reception	Sirkulasi	Kelengkapan	Waktu	
1.	Mengajukan Pemohonan Anggota Perpustakaan kepada Petugas Pendaftaran (Reception)	Anggota	Reception		Formulir Pendaftaran	15 Menit	Ketersediaan Data Pemustaka
2.	Melengkapi Persyaratan Pendaftaran dan diserahkan kepada Petugas Pendaftaran (Reception)	Tidak			Foto Copy KTPKK, Pas Photo	1 hari	Ketersediaan Bakas Pemustaka
3.	Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran oleh Petugas Pendaftaran (Reception)		Ya		Kelengkapan Persyaratan	5 menit	
4.	Penerbitan KTA Oleh Petugas Pendaftaran				KTA	2 hari	KTA Anggota
5.	Menyerahkan Buku dan KTA kepada Petugas Sirkulasi				Buku dan KTA	5 menit	Data Buku
6.	Memeriksa Fisik Buku dan Mendata (Menginput ke System)				Buku	10 menit	Data Buku
7.	Mencantumkan Tg Kembali oleh Petugas Sirkulasi				Stampel	3 menit	Data Kembali
8.	Menyerahkan Buku dan KTA kepada Pemegang oleh Petugas Sirkulasi				Buku	2 menit	Data Pemegang
9.	Menyerahkan Buku yang dipinjam kepada Petugas Sirkulasi				Buku	1 menit	Data Pengembalian

Gambar 5 SOP Layanan Perpustakaan Pondok Sejuta Ilmu

Kegiatan pengawasan berupa supervisi, evaluasi, dan pelaporannya juga dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Di setiap akhir tahun anggaran, pengelola perpustakaan diundang dalam rapat evaluasi kinerja untuk menyampaikan serapan dana yang diberikan pada satu tahun anggaran. Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan selama ini dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada pemerintah desa dan Perpustakaan Nasional.

Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan bulanan. Meski demikian, pemerintah desa belum memiliki mekanisme audit mutu internal (AMI) secara teratur dan berkesinambungan.

Kerja Sama atau Kemitraan

Pustakawan mempunyai peran untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait dengan membentuk sebuah ekosistem perpustakaan. Ekosistem tersebut perlu dibangun agar dapat menjamin keberlanjutan program dan kegiatan di perpustakaan. Perpustakaan memiliki keterbatasan sumber daya dalam rangka pengembangan perpustakaan secara menyeluruh. Untuk itulah perpustakaan melakukan kemitraan dengan beberapa instansi pemerintah, pihak swasta, dan *stakeholder* yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan perpustakaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, kemitraan perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang dengan berbagai *stakeholder* sudah dilakukan

secara optimal. Bentuk kemitraannya berupa dukungan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan seperti pelatihan, *workshop*, pendanaan, pemateri, konsumsi, *backdrop*, umbul-umbul, publikasi, dll.

Berdasarkan observasi, perpustakaan inklusi sosial di Kabupaten Magelang telah menjalin kerja sama dengan representasi instansi pemerintah maupun swasta seperti: pendamping desa, pendamping lokal desa, tenaga ahli (Kemendes), penyuluh pertanian (Kementan), kelompok sadar wisata/pokdarwis (Kemenpar), tenaga pendamping sanitasi & penyediaan air minum (PUPR), puskesmas, polsek, LPK, dan lain-lain. Namun demikian, secara administrative pada umumnya perpustakaan desa inklusi sosial yang berkembang optimal memiliki dokumen perjanjian kerja sama (PKS) sebagai dasar yuridis kegiatan kerja sama, sebaliknya perpustakaan inklusi sosial yang belum berkembang tidak dapat menunjukkan bukti dokumen kerja sama. Dari segi administrasi perpustakaan desa inklusi sosial yang belum berkembang pada umumnya memiliki kekurangan dalam mengadministrasi kegiatan.

Pemberdayaan Masyarakat

Untuk menarik pemustaka, perpustakaan menginisiasi berbagai kegiatan pelibatan masyarakat. Kegiatan pelibatan masyarakat yang diselenggarakan perpustakaan pada umumnya berbasis kebutuhan masyarakat. Difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan sasaran pada pemuda (termasuk anak-anak), perempuan, maupun wirausaha. Kegiatan pelibatan masyarakat yang telah

dilakukan perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan peningkatan *skill* atau keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Pelatihan-pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan di tingkat masyarakat terkecil yang mencakup berbagai strata sosial dan ekonomi. Kegiatan juga disusun berdasarkan kondisi atau situasi, sehingga keterampilan tersebut menjadi urgen untuk dikuasai. Misalnya pelatihan merajut (masker dan konektor) dan pemasaran *online*, sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan berkesinambungan mulai tingkat awal sampai pada tingkat kemandirian, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menghasilkan *output* (luaran), tetapi yang lebih penting *outcome* (dampak). Bekal dari pelatihan berdampak pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan warga masyarakat Desa Mangunsari yang menerima manfaat program pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

Nama : Ibu Wiwin Kamilati
Usia : 50 tahun
Profesi : Pengusaha snack rumahan

P : Bisa ceritakan bagaimana tentang perkembangan usaha *snack* setelah mengikuti program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan perpustakaan desa?

R : Saya awalnya hanya ibu PKK, lalu berawal coba-coba membuat aneka kue, namun kurang berhasil, lalu saya diajak ke perpustakaan desa melihat buku-buku yang isinya

tentang kue. Kemudian saya praktikkan di kantor desa bersama ibu-ibu PKK yang lainnya, begitu seterusnya. Kemudian saya tekunin sehingga sampai sekarang usaha ini berjalan, kwe yang saya jual berupa kue risol, kue sus, kue tapas, kue selimut, kue lumpur, dll. bergantung pesanan. Sejak itu saya sering ke perpustakaan desa mencari buku-buku olahan makanan. *Alhamdulillah* dua tahun ini usaha saya dikenal berkat pelatihan pemasaran online dari perpustakaan desa.

P : Bagaimana dengan peningkatan penjualannya?

R : Ya kira-kira naik 30% sampai 40%, *Alhamdulillah*.

P : Bagaimana pendapat Ibu mengenai perpustakaan desa dan apa harapan ke depannya?

R : Perpustakaan sangat membantu saya dalam pembuatan kue, mulai dari ide, pengemasan, pemasarannya, sampai kami diajari membuat *sticker* merk usaha kami. Kami difasilitasi pelatihan dan mendapatkan bantuan mesin *sealer* ini sangat membantu. Saya harap buku-buku dan pelatihan-pelatihan di perpustakaan desa lebih digiatkan lagi seperti ini.

Desain *sticker* merk usaha kue *Mbah Tijo* yang dikelola Ibu Wiwin merupakan luaran dari pelatihan penjualan *online* dan pembuatan *sticker* merk yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Mardining Sigit. Desain tersebut diilustrasikan pada gambar 19.



Gambar 6 Desain Sticker Merk Usaha Kue Mbah Tijo

SIMPULAN

Kondisi aktual pelaksanaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang dapat dikatakan sudah memenuhi 8 (delapan) aspek dalam: (1) Panduan Umum Literasi untuk Kesejahteraan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, (2) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan (3) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Desa/Kelurahan. Pengelola perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang, yaitu (1) pengelolaan bahan perpustakaan, (2) koleksi, (3) layanan, (4) tanaga perpustakaan, (5) penyelenggaraan perpustakaan, (6) pengelolaan perpustakaan, (7) kerja sama atau kemitraan, dan (8) pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan, pengelola perpusdes sebaiknya menggunakan standar-standar yang mengacu pada: (1)

Panduan Umum Literasi untuk Kesejahteraan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, (2) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan (3) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Desa/Kelurahan. Berdasarkan kondisi aktual, pengelola perpustakaan desa inklusi sosial di Kabupaten Magelang perlu meningkatkan pada aspek layanan dan pengelolaan perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albaar, H. & Saufa, A. F. (2019). Peran Makerspace di Perpustakaan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, 35(1), 001-013. Retrieved from <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkdmm/article/view/JKDM MV35N1%2C001-013>
- Ariyani, L. P. S. & Pageh, I. M. (2018). Pengembangan perpustakaan umum desa di kabupaten buleleng (sistem pengelolaan dan kendalanya). *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2*, 254-259. Diakses dari <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (2021). *Kabupaten Magelang dalam angka*. Magelang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
- Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial. *Seminar Nasional Multikulturalisme dan Inklusi Sosial 2019*, 2(3), 114-118. DOI: 10.32734/lwsa.v2i2.728

- Malawa, S. (2019). Model dan konsep transpormasi perpustakaan berbasis inklusiosial di era digital. *Proseding Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia*.
- Media Indonesia. (2018). Perpustakaan nasional tingkatkan literasi masyarakat. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humani-ora/266450/perpustakaan-nasional-tingkatkan-literasi-masyarakat>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. USA: Sage Publications.
- Misno, A. (2020). *Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial*. Diakses dari <https://inais.ac.id/transformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-sosial/>
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- Perpustakaan Nasional RI. (2019). *Panduan umum literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda, H. (2019). Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera (Studi pada perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). *Proseding Seminar Nasional MACOM III*, 907-918. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/338983808_Strategi_Sukses_Transformasi_Perpustakaan_Desa_Berbasis_Inklusi_Sosial_untuk_Masyarakat_Sejahtera_Studi_Pada_Perpustakaan_Desa_Gampingan_Gemar_Membaca_Malang
- Silalahi, C. (2021). *Membangun desa menata kota melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial*. Diakses dari <http://disperpusip.sumutprov.go.id/file/2021/04/Chandra-Inklusi-Sosial-dikonversi/>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 *Perpustakaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774. Jakarta.
- Utami, D. & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. *Visi Pustaka*, 21(1), 31-38. DOI: <https://doi.org/10.37014/visi%20pustaka.v21i1.74>